

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam perjalanan sejarahnya, Muhammadiyah tidak pernah benar-benar terpisah dari Kehidupan politik. Saat Masyumi lahir diberi fasilitas oleh Jepang pada tahun 1943, Muhammadiyah ikut berpartisipasi. Begitupun saat Masyumi lahir yang dibidangi oleh umat Islam tahun 1945 dan berganti menjadi sebuah partai tahun 1947, Muhammadiyah dan NU menjadi anggota yang spesial. Hal ini wajar karena Muhammadiyah memberikan kebebasan berpolitik anggota-anggotanya termasuk juga para elit pimpinannya. Hal ini semakin mengental kembali setelah zaman baru demokratisasi dan desentralisasi pasca tumbanganya kekuasaan orde baru tahun 1998. Keterlibatan elit Muhammadiyah dan para pengurusnya serta anggotanya di semua level ini dalam rangka merespon perubahan sistem politik, yaitu dari model pemilu tertutup dan tidak langsung menjadi kompetisi terbuka ala demokrasi liberal (*direct democracy*). Keterlibatan Masyumi selesai selepas Muhammadiyah melepaskan anggota istimewanya pada 1959.

Ketika Muhammadiyah berdiri tidak dibangun sebagai partai, tapi sebatas "gerakan politik", tentunya selain gerakan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*. Struktur gerakan politik terlihat dari aturan K.H. Ahmad Dahlan yang merangkai hubungan politik dengan berbagai pihak. Akrab dengan Budi Utomo, SI, K.H. Misbah (komunis), dan termasuk golongan Ahmadiyah.

ketika Parmusi telah “memfusi” ke PPP sampai bisa menjadi pembetul untuk menjauh dari Parmusi dan partai lainnya.

Bersamaan hancurnya rezim Orde Baru, ketika Tanwir Semarang tahun 1998, Muhammadiyah merancang rekomendasi politik yang salah satu poinnya dianggap sebagai pembenar bagi terbentuknya PAN. Rekomendasi ini mempercepat proses terbentuknya PAN, sehingga *euforia* politik masyarakat Muhammadiyah dilampiasikan ke PAN.

Seperti sejarah terulang, Tanwir Denpasar tahun 2002, Muhammadiyah kembali membentuk putusan normatif tentang posisi nonafiliasinya. Dalam (poin 6) disebutkan, Muhammadiyah tak berafiliasi dan tak memiliki hubungan organisatoris dengan kekuatan politik atau organisasi manapun. Muhammadiyah mengembangkan aksi positif dalam memandang perjuangan politik dan melaksanakan peran kritik sesuai fungsi *amar ma'ruf nahi munkar* demi berdirinya sistem politik kenegaraan yang demokratis dan berkeadaban.

Penjelasan di atas merupakan kenyataan politik yang sering memaksa Muhammadiyah untuk beraksi. Sebagai organisasi yang berdiri dalam sistem politik, tentu tidak mungkin untuk Muhammadiyah berdiam diri. Tetapi aksi Muhammadiyah kadang-kadang dikritisi dan dibaca sebagai inkonsistensi Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat keagamaan. Sehingga Muhammadiyah dianggap sering tergoda tergolong dalam wilayah politik yang tak selayaknya, yakni politik yang dominan berorientasi pada kekuasaan dan politik saling mendukung pada kandidat tertentu, terlebih saat pemilihan presiden.

memperlihatkan soliditas elit dalam mengusung Muhammad Amien Rais, walau fakta menunjukkan tidak semua warga Muhammadiyah memilih MAR.

Hal ini dapat dibenarkan karena tradisi otonom warga Muhammadiyah yang sangat kuat dan tidak monolitik. Banyak *survey* politik menunjukkan bahwa warga Muhammadiyah terafiliasi ke dalam parpol yang beragam (Bush, 2012).

Perbedaan pilihan elit pada awalnya lebih disinyalir karena kedekatan emosional dan bukan *by design*. Upaya menyebarkan dukungan untuk menyelamatkan agar Muhammadiyah tetap "aman" siapa pun pemenangnya sebenarnya tidak pernah mendapatkan pembenaran, sebab Muhammadiyah tidak biasa "meminta" fasilitas Negara dan juga tidak mudah merasa terancam oleh kekuasaan negara (*the rulling elite*).

Hampir dapat dipastikan bahwa pada setiap *event* politik baik di tingkat nasional maupun lokal selalu muncul tuntutan dan bahkan gugatan tentang sikap dan posisi politik Muhammadiyah. Tuntutan itu bisa datang dari dalam maupun dari luar Muhammadiyah. Dari luar datang dengan maksud mendapatkan dukungan politik. Sementara dari dalam muncul untuk mengkapitalisasi Muhammadiyah dengan maksud mendapatkan keuntungan dan manfaat politik baik untuk kepentingan Persyarikatan maupun (boleh jadi) untuk kepentingan segelintir elit; baik untuk kepentingan jangka panjang maupun jangka pendek. Merespon fenomena politik yang senantiasa berulang tersebut bagaimana sejatinya memahami dan memposisikan sikap politik Muhammadiyah? Pemahaman ini penting karena jika Muhammadiyah berada

*Kedua*, Muhammadiyah beranggapan negara dan usaha mendirikan kehidupan berbangsa dan bernegara, baik lewat perjuangan politik maupun pengembangan masyarakat, dengan latar belakang wahana yang mutlak dibutuhkan untuk membangun. Dimana, nilai-nilai Illahiyah melandasi dan tumbuh subur bersamaan dengan tegaknya nilai-nilai kebersamaan, keadilan, perdamaian, ketertiban, keadaban sebagai bentuk terciptanya "*Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*".

*Ketiga*, Muhammadiyah memilih perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara lewat pemberdayaan masyarakat guna untuk menciptakan masyarakat madani yang kuat sebagaimana visi Muhammadiyah untuk menciptakan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Meskipun yang tentang kebijakan kenegaraan akan dicapai lewat pendekatan secara tepat dan bijaksana sesuai prinsip perjuangan komunitas kepentingan yang efektif dalam kehidupan negara yang demokratis.

*Keempat*, Muhammadiyah mendukung secara kritis atas perjuangan politik yang bersifat praktis dan berorientasi pada kekuasaan untuk dilaksanakan oleh partai politik dan lembaga formal kenegaraan dengan semaksimal mungkin. Dalam hal ini, perjuangan politik yang dilaksanakan kekuatan politik hendaknya mengedepankan kepentingan rakyat dan tegaknya nilai-nilai utama sebagaimana yang menjadi semangat dasar dan tujuan dibangunkannya NKRI yang diproklamasikan tahun 1945.

*Kelima*, Muhammadiyah senantiasa menjalankan peran politiknya sebagai wujud dari dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* dengan jalur untuk

Lika-liku hubungan Muhammadiyah dengan Negara sudah terlihat jelas dalam perjalanan sejarah. Peran politik Muhammadiyah tergambar mengalami pasang surut: manis di kala bulan madu dan saling memberi, pahit getir yang berujung trauma tatkalah terpinggirkan. Muhammadiyah tak boleh terjebak dalam kebingungan politik yang penuh traumatik. Dalam era politik elektoral yang liberal seperti sekarang tentu Muhammadiyah harus pro-aktif memberdayakan kadernya sehingga saat digantikan dan diberikan pada berbagai kedudukan penting. Dengan demikian, jangan sampai juga tercipta kesan inkonsistensi dan kegalauan saat dipaksa menyampaikan kebijakan politik.

Masyarakat akan selalu menilai dan menunggu ketepatan aksi politik Muhammadiyah yang pasti akan selalu berprinsip pada kemaslahatan negara, bangsa, serta umat. Inkonsistensi sikap, terlebih saat terjadi perselisihan aksi dan pilihan praktek politik antara Muhammadiyah di level lokal terhadap aksi di level pusat pasti akan menjadi sorotan publik. Dalam konteks pengerahan dukungan bentuk organisasi Muhammadiyah pada calon Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sulawesi Selatan pada Pemilu 2014 selain keluar dari “pakem” juga dinilai bertolak belakang dengan kebijakan yang dikeluarkan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (Nurmadi et al., 2015).

Sehingga Muhammadiyah dituntut untuk menghidupkan kembali fungsi politik kebangsaannya. Pada satu bidang memperkuat jabatan politik Muhammadiyah walaupun tetap berada di jalan non politik tapi di bidang lain

memacu terkonstruksinya alam pikir strategis, taktis dan futuristik di tengah banyak pilihan strategis dan artikulasi politik.

Gerakan politik yang digerakkan oleh kader-kader muda Muhammadiyah pada pemilu Presiden tahun 2019 satu sisi menunjukkan peranan yang sangat konstruktif bagi kader Muhammadiyah di arena politik kebangsaan. Sejumlah agenda strategis dirancang oleh para kader muda Muhammadiyah yang siap untuk berkiprah secara maksimal di arena politik kebangsaan. Tekadnya, tanpa menunggu uluran tangan Muhammadiyah, mereka akan bergerak mengembangkan dan menyalurkan potensi dan kemampuannya untuk mengisi ruang-ruang artikulasi politik, hukum, ekonomi, dan lain-lain, di arena yang jauh lebih luas ketimbang harus berebutan mengisi jabatan-jabatan di arnal usaha Muhammadiyah.

Para kader yang menyebut dirinya sebagai eksponen muda Muhammadiyah berhimpun dalam wadah Rumah Indonesia Berkemajuan (RIB) yang mendukung pasangan calon presiden Joko Widodo dan wakil presiden Ma'ruf Amin, dan Aliansi Pencerah Indonesia (API) yang mendukung pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno. Eksponen muda Muhammadiyah dalam hal ini merupakan kader-kader muda Muhammadiyah yang pernah mengenyam proses pengkaderan dan menjabat secara struktural di organisasi otonom Muhammadiyah.

Sebenarnya masih ada beberapa gerakan eksponen muda Muhammadiyah yang pada pemilu Presiden tahun 2019 ber-*ijtihad* politik kebangsaan, baik

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Memperkaya khazanah keilmuan, khususnya kaitannya dengan peran kader-kader muda muhammadiyah pada kontestasi pilpres 2019;
2. Meningkatkan dan mengoptimalkan peran generasi muda muhammadiyah dalam ranah kebangsaan;
3. Meningkatkan peran Muhammadiyah dalam menumbuhkan kesadaran berpolitik bagi angkatan muda Muhammadiyah.